

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ke-enam indikator tersebut, implementasi kebijakan Kampung KB yang ada di Desa Jurug sebagian besar sudah tercapai keberhasilannya pada lima indikator keberhasilan tersebut. Mulai dari cara pengimplementasian Kampung KB itu sendiri, sampai kepada aparatur pelaksana yang bisa dikatakan sudah cukup mampu dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Namun disisi lain ada sebagian yang belum terlaksana dengan baik, satu diantaranya adalah dari segi Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik. Dikarenakan penggunaan anggaran yang berlebihan yang mengakibatkan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi aparatur untuk kembali memperhitungkan dampak kedepan dari kurang hati-hatian dalam menggunakan anggaran dana implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disampaikan pada Bab III yang sebagaimana itu tentang proses implementasi kebijakan kampung KB, mulai dari peluncuran program dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai pada tahap penilaian masyarakat terhadap Kampung KB, maka implementasi kebijakan Kampung KB itu sendiri diukur menjadi 6 indikator yang ada sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan Kebijakan Kampung KB dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya standar atau tolok ukur yang menjadikan setiap implementasi dapat terstruktur dengan baik. Mulai dari tujuan didirikannya Kampung KB sampai

- pada pertimbangan jumlah anggaran yang menjadi faktor pendukung jalannya implementasi, semua sudah jelas dan terstruktur dengan baik
2. Sumberdaya juga sudah sangat mendukung dalam penyuksesan implementasi kebijakan Kampung KB, yaitu dibuktikan dengan adanya beberapa fasilitas untuk menunjang proses jalannya implementasi, serta perkembangan minat masyarakat yang ada di Desa Jurug untuk mengikuti Program KB
 3. Karakteristik agen pelaksana juga mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, sehingga pelaksana kebijakan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional yang dibuktikan dengan adanya tahapan prosedur pelayanan KB, sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan pun dapat berjalan secara bertahap. Disisi lain kemampuan aparatur pelaksana juga bisa dibilang “ *sangat berkelas* ”karena berbagai raihan penghargaan yang telah didapat dari kejuaraan Kampung KB tingkat provinsi
 4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana juga dapat menarik minat masyarakat dalam mengikuti Kampung KB, dibuktikan dengan antusiasme masyarakat ketika diberitau tentang adanya kebijakan Kampung KB dan juga para aparatur pelaksana melayani dengan ramah tamah serta penuh dedikasi
 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivis dilaksanakan dengan cara mengadakan musyawarah dengan kader pemerintah desa dan penyuluh lapangan KB serta berbagai sosialisasi dan evaluasi kepada para aktivis pelaksana.
 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang berkaitan dengan pelaksana kebijakan juga sudah dipertimbangkan secara matang dengan tujuan agar dalam proses

implementasi dapat terstruktur dengan baik. Caranya adalah dengan melakukan training sebelum pelaksana terjun ke lapangan. Namun disisi lain dalam indikator ini terdapat kendala dalam implementasi ini, yaitu penggunaan anggaran yang terlalu boros, dikarenakan dana yang dikeluarkan dari pelaksana kebijakan terlalu banyak sehingga masih kurang memenuhi untuk proses jalannya implementasi

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas yang membahas tentang Implementasi kebijakan kampung KB di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2017 dalam menangani pertumbuhan penduduk, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Gunakanlah anggaran sesuai dengan keperluan agar anggaran tidak keluar terlalu banyak, dikarenakan untuk kebutuhan perlengkapan p jika semisalkan suatu saat kita membutuhkan anggaran yang banyak
2. Aparatur pelaksana harus tetap konsisten dalam melaksanakan kewajibannya dalam melayani masyarakat serta membuat nyaman peserta Kampung KB
3. Tingkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas, terutama bagi aparatur pelaksana